

# IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN *PILOT* *PROJECT CITIZEN* BERBASIS NASIONALISME PADA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DEMI MEWUJUDKAN KARAKTER PESERTA DIDIK

Rima Vien Permata H<sup>1</sup>

Anita Trisiana<sup>2</sup>

*Perubahan masyarakat berjalan begitu cepat, dan sistem sosialpun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dilematika perubahan sosial tersebut mempengaruhi perubahan individu, dan berdampak pula terhadap bidang kehidupan yang lainnya. Salah satunya bidang pendidikanpun tidak bisa terlepas dari dampak perubahan sosial tersebut. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap pembentukan dan pengembangan karakter peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata ajar yang berbasis nilai akan menjadi salah satu alternatif dalam mengembangkan karakter peserta didik. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat juga berdampak terhadap pergeseran nilai – nilai nasionalisme yang dapat mengganggu internalisasi nilai sebagaimana yang diusung dalam mata ajar pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan model pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis nasionalisme di sekolah demi mewujudkan karakter peserta didik, dalam hal ini model pembelajaran yang akan dikembangkan adalah pilot project citizen.*

Akhir-akhir ini begitu banyak sosok manusia Indonesia yang tampil penuh pamrih, tidak tulus ikhlas, tidak bersungguh-sungguh, senang yang semu, semakin lekat dengan tradisi

<sup>1</sup> Dosen FKIP UNS.

<sup>2</sup> Dosen FKIP UNS.

ABS, tampil sebagai *yes man*, dan sifat-sifat buruk lainnya. Sifat dan sikap yang demikian itu akan termanifestasikan pada perilaku yang suka menyalahkan orang lain, senang menghujat dan tidak dapat dipegang janjinya, menjadi sosok yang pemaarah, pendendam, tidak toleran, perilaku buruk dalam berkendara, praktik korupsi, premanisme, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab, menurunnya penghargaan kepada para pemimpin, dan sebagainya. Lebih jauh lagi kini antar anak bangsa saja sudah saling curiga mencurigai, misalnya dengan yang berbeda etnis, agama, dan kelas sosial. Mahatma Ghandi (dalam Soedarsono, 2010) mengurai sebagai 'tujuh dosa yang mematikan' (*the seven deadly sins*) yaitu (1) semakin merebaknya nilai-nilai dan perilaku memperoleh kekayaan tanpa bekerja (*wealth without work*); (2) kesenangan tanpa hati nurani (*pleasure without conscience*); (3) pengetahuan tanpa karakter (*knowledge without character*); (4) bisnis tanpa moralitas (*commerce without ethic*); (5) ilmu pengetahuan tanpa kemauan (*science without humanity*); (6) agama tanpa pengorbanan (*religion without sacrifice*); dan (7) politik tanpa prinsip (*politic without principle*).

Kondisi yang demikian itu merupakan indikasi hilangnya karakter yang akan mengarah pada kehilangan segalanya. Oleh karena itu, perlu disadari oleh seluruh pemangku kepentingan (*stake-holder*) termasuk seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perhatian yang cukup signifikan untuk memulai kembali membangun karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa di atas pada prinsipnya, merupakan pengembangan budaya dan karakter bangsa yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Nasionalisme saat ini dirasakan mulai terkikis dengan berbagai faktor. Karena terkikisnya nasionalisme inilah banyak pihak yang mulai membangkitkan semangat nasionalisme melalui berbagai kegiatan. Karena semakin lama dampak dari nasionalisme itu sendiri semakin dapat dirasakan dengan tidak terciptanya keteraturan sosial yang sangat penting di dalam masyarakat yang majemuk. Bila kita tarik ke belakang pada kesejarahan Indonesia maka kita dapati betapa pentingnya peran nasionalisme dalam pembentukan Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan perlawanan terhadap kolonialisme. Diawali dengan para mahasiswa yang menikmati bangku pendidikan sehingga menimbulkan sikap kritis mereka terhadap lingkungan sekitar, lalu berlanjut ke pembentukan organisasi-organisasi, sumpah pemuda hingga akhirnya membuahakan kemerdekaan kepada Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Nasionalisme juga ambil peran penting dalam hal perlawanan kolonialisme di Indonesia, karena ternyata dengan adanya nasionalisme di Indonesia pada waktu itu dapat mengintegrasikan seluruh kekuatan di Indonesia untuk melawan kolonialisme yang sebelumnya kekuatan di Indonesia masih terkotak-kotak oleh kondisi geografis.

Banyak nilai yang ditanamkan pada diri siswa dalam PKn untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu nilai yang penting ditanamkan pada siswa yaitu nilai moral. PKn mengajarkan nilai moral pada siswa. Nilai moral ini diajarkan guru kepada muridnya tentang bagaimana bersikap dalam masyarakat yaitu antara lain: saling membantu, tolong menolong, dan sopan santun dalam bertindak. Menurut (Rofi Yani, 2012) tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki

kemampuan yaitu : pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Kedua, berpartisipasi secara aktif, bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Hasil-hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara sesungguhnya menyimpulkan bahwa secara umum pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan di berbagai negara mengarahkan warga bangsa itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa bersangkutan. Sesungguhnya banyak aliran filsafat yang dapat dijadikan pembenar bagi upaya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*). Namun, landasan filsafat tersebut, kemudian,

perlu dicari relevansinya dengan kondisi dan tantangan kehidupan nyata dalam masyarakat tertentu, agar *civic education* (pendidikan kewarganegaraan) mampu memberikan kontribusi yang positif bagi pemecahan kemasyarakatan yang sedang dan akan dihadapi suatu bangsa atau masyarakat. Oleh karenanya, apapun bentuk pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan di berbagai bangsa, nilai-nilai fundamental dari suatu masyarakat perlu dikembangkan sesuai dengan dinamika perubahan sosial, agar nilai-nilai fundamental tersebut menemukan relevansinya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan problem suatu masyarakat.

Semua fenomena yang digambarkan tersebut di atas semakin menambah panjang akses dari gelombang demokrasi terhadap tumbuhnya nilai - nilai nasionalisme. Nasionalisme seperti telur di ujung pedang yang sewaktu - waktu terjatuh dan berantakan tanpa bentuk. Tentunya sebagai bagian dari komponen bangsa ini tidak akan rela dan merelakan kondisi yang demikian, sehingga harapannya melalui pendidikan kewarganegaraan nilai - nilai nasionalisme tersebut dapat dibangun dengan kokoh di atas fondasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tulisan ini akan mengupas lebih dalam mengenai implementasi model pembelajaran *pilot project citizen* pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berbasis nasionalisme sehingga karakter peserta didik dapat terbentuk.

### **Nasionalisme dalam pendidikan kewarganegaraan**

Ahli sejarah terkemuka Sartono Kartodirdjo mengemukakan bahwa yang disebut *nation* dalam konteks nasionalisme Indonesia ialah suatu konsep yang dialamatkan pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama, yang mencakup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek etnis, kelas atau golongan sosial, sistem kepercayaan, kebudayaan, bahasa dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya terintegrasi dalam perkembangan sejarah sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan politik bersama (dalam "Nasionalisme, Lampau dan Kini" Seminar Tentang Nasionalisme 1983 di Yogyakarta).

Pengertian yang diberikan Sartono Kartodirdjo didasarkan pada perkembangan sejarah bangsa Indonesia dan realitas sosial budayanya, serta berda-

sarkan berbagai pernyataan politik pemimpin Indonesia sebelum kemerdekaan, seperti manifesto Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928. Unsur-unsur nasionalisme Indonesia mencakup hal-hal seperti berikut: 1). Kesatuan (*unity*) yang mentransformasikan hal-hal yang bhinneka menjadi seragam sebagai konsekwensi dari proses integrasi. Tetapi persatuan dan kesatuan tidak boleh disamakan dengan penyeragaman dan keseragaman. 2). Kebebasan (*liberty*) yang merupakan keniscayaan bagi negeri-negeri yang terjajah agar bebas dari dominasi asing secara politik dan eksploitasi ekonomi serta terbebas pula dari kebijakan yang menyebabkan hancurnya kebudayaan yang berkepribadian. 3). Kesamaan (*equality*) yang merupakan bagian implisit dari masyarakat demokratis dan merupakan sesuatu yang berlawanan dengan politik kolonial yang diskriminatif dan otoriter. 4). Kepribadian (*identity*) yang lenyap disebabkan ditiadakan dimarginalkan secara sistematis oleh pemerintah kolonial Belanda. 5). Pencapaian-pencapaian dalam sejarah yang memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi suatu bangsa sehingga bangkit semangatnya untuk berjuang menegakkan kembali harga diri dan

martabatnya di tengah bangsa. Konsepnya itu didasarkan atas pengamatannya terhadap sejarah Indonesia khususnya sejak masa penjajahan. Ia jelas sekali menerima beberapa pandangan yang dikemukakan oleh Ernest Renan.

Notonagoro, seorang ahli falsafah dan hukum terkemuka dari Universitas Gadjah Mada, mengemukakan bahwa nasionalisme dalam konteks Pancasila bersifat majemuk tunggal (Bhinneka Tunggal Ika). Unsur-unsur yang membentuk nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut: 1). Kesatuan Sejarah, yaitu kesatuan yang dibentuk dalam perjalanan sejarahnya yang panjang sejak zaman Sriwijaya, Majapahit dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam hingga akhirnya muncul penjajahan VOC dan Belanda. Secara terbuka nasionalisme mula pertama dicetuskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. 2). Kesatuan Nasib. Bangsa Indonesia terbentuk karena memiliki persamaan nasib, yaitu penderitaan selama masa penjajahan dan perjuangan merebut kemerdekaan secara terpisah dan bersama-sama, sehingga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa da-

pat memproklamasikan kemerdekaan menjelang berakhirnya masa pendudukan tentara Jepang. 3). Kesatuan Kebudayaan. Walaupun bangsa Indonesia memiliki keragaman kebudayaan dan menganut agama yang berbeda, namun keseluruhannya itu merupakan satu kebudayaan yang serumpun dan mempunyai kaitan dengan agama-agama besar yang dianut bangsa Indonesia, khususnya Hindu dan Islam. 4). Kesatuan Wilayah. Bangsa ini hidup dan mencari penghidupan di wilayah yang sama yaitu tumpah darah Indonesia. 5). Kesatuan Asas Kerohanian. Bangsa ini memiliki kesamaan cita-cita, pandangan hidup dan falsafah kenegaraan yang berakar dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri di masa lalu maupun pada masa kini.

Dalam kaitannya dengan bentuk pemerintahan atau negara, Soepomo dan Mohamad Yamin mengemukakan agar bangsa Indonesia menganut paham integralistik, dalam arti bahwa negara yang didiami bangsa Indonesia merupakan suatu kesatuan integral dari unsur-unsur yang menyusunnya. Paham integralistik mengandaikan bahwa negara harus mengatasi semua golongan. Notonagoro di lain hal mengusulkan agar NKRI

menjadi negara yang berasaskan kekeluargaan, tetapi diartikan keliru oleh Suharto dan rezimnya selama lebih 30 tahun. Sampai sekarang tampaknya kita masih gamang akan memilih paham yang mana untuk menentukan masa depan negara kita. Kita juga belum tahu bagaimana menempatkan kebudayaan penduduk Nusantara yang bineka itu, yang multi-etnik, multi-budaya dan multi-agama, dalam rangka negara persatuan

### **Pengembangan karakter dalam model pembelajaran *pilot project citizen***

Pendidikan karakter diartikan sebagai *the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal character development* (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan sekolah untuk membantu pengembangan karakter dengan optimal). Hal ini berarti untuk mendukung perkembangan karakter peserta didik harus melibatkan seluruh komponen di sekolah baik dari aspek isi (*the content of the curriculum*), proses pembelajaran (*the procces of instruction*), kualitas hubungan (*the quality of relationships*), penanganan mata pelajaran (*the handling of discipline*), pelaksanaan aktivitas ko-kurikuler, serta etos seluruh lingkungan sekolah.

(Zubaedi, 2011:14).

Menurut David Elkind dan Freddy Sweet (dalam Zubaedi, 2011:15) *character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical value* (pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk membantu manusia memahami, peduli, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti). Ketika kita berpikir tentang jenis karakter yang kita inginkan bagi anak-anak, maka jelas bahwa kita mengharapkan mereka mampu menilai apakah kebenaran, peduli secara sungguh-sungguh terhadap kebenaran, dan kemudian mengerjakan apa yang diyakini sebagai kebenaran, bahkan ketika menghadapi tekanan dari luar dan upaya dari dalam.

Pendidikan karakter menurut Ratna Megawangi (2004:95), merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Definisi lain dikemukakan oleh Fakry Gaffar (2010:10) bahwa pendidikan karakter merupakan transformasi nilai-nilai kehidupan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu.

Dalam *grand desain* pendidikan karakter, pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nilai luhur ini berasal dari teori pendidikan, psikologi pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, ajaran agama, Pancasila dan UUD 45, dan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta pengalaman terbaik dan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur ini juga didukung oleh komitmen dan kebijakan pemangku kepentingan serta pihak-pihak terkait lainnya termasuk dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai luhur tersebut antara lain: kejujuran, kemandirian, sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berpikir termasuk kepenasaran akan intelektual,

dan berpikir logis. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak bisa hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu. Penanaman pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan, dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta didik dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat maupun lingkungan (*exposure*) media massa.

Karakter didefinisikan oleh Ryan dan Bohlin (dalam Ahmad Tafsir, 2011) mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*loving the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Dalam pendidikan karakter kebaikan itu sering kali dirangkum dalam sederet sifat-sifat baik. Dengan demikian, maka pendidikan karakter adalah upaya untuk membimbing perilaku manusia menuju standar baku. Upaya ini juga memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan etika, tetapi praktiknya meliputi penguatan kecakapan yang penting yang mencakup perkembangan sosial siswa.

Homby dan Parnwell (dalam Ahmad Tafsir, 2011) karakter adalah kualitas mental, kekuatan moral, nama atau

reputasi. Hermawan Kertajaya mendefinisikan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.

Dinamika pemahaman pendidikan karakter berproses melalui tiga momen: momen historis, momen reflektif, dan momen praktis. Momen historis, yaitu usaha merefleksikan pengalaman umat manusia yang bergulat dalam menghidupi konsep dan praksis pendidikan khususnya dalam jatuh bangun mengembangkan pendidikan karakter bagi anak didik sesuai dengan konteks zamannya. Momen reflektif, sebuah momen yang melalui pemahaman intelektualnya manusia mencoba melihat persoalan metodologis, filosofis, dan prinsipil yang berlaku bagi pendidikan karakter. Momen praktis, yaitu dengan bekal pemahaman teroretis konseptual itu, manusia mencoba menemukan secara efektif agar proyek pendidikan karakter dapat efektif terlaksana di lapangan (Masnur Muslich, 2011).

Pendidikan karakter sebagai bagian dari upaya



membangun karakter bangsa mendesak untuk diterapkan. Pendidikan karakter menjadi vital dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan Indonesia baru yaitu Indonesia yang dapat menghadapi tantangan regional dan global. Mengambil analogi dari bangunan sebuah rumah agar kokoh harus ditopang oleh pilar yang kuat. Rumah dengan pilar yang kuat akan tahan dari terpaan angin maupun guncangan gempa sekalipun. Demikian juga pendidikan karakter, secara nasional, hendaknya ditopang oleh pilar yang kuat agar tidak mudah hilang tergerus arus perjalanan sejarah. Oleh karena pendidikan karakter sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan sistem pendidikan nasional, maka harus dikembangkan dan dilaksanakan secara sistemik dan holistik dalam tiga pilar nasional pendidikan karakter, yaitu: 1). satuan pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, satuan/program pendidikan nonformal), 2). keluarga (keluarga inti, keluarga luas, keluarga orang tua tunggal), dan 3). masyarakat (komunitas, masyarakat lokal, wilayah, bangsa, dan negara). Hal ini juga konsisten dengan konsep tanggung jawab pendidikan nasional yang berada pada sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Indonesia Heritage Foundation merumuskan sembilan pilar karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan pilar tersebut meliputi: 1). Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, 2). Tanggung jawab, disiplin dan mandiri, 3). Jujur, 4). Hormat dan santun, 5). Kasih sayang, peduli, dan kerja sama, 6). Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, 7). Keadilan dan kepemimpinan, 8). Baik dan rendah hati, dan 9). Toleransi, cinta damai dan persatuan.

Sementara *Character Counts* di Amerika mengidentifikasi bahwa karakter-karakter yang menjadi pilar yaitu: dapat dipercaya (*trustworthiness*), rasa hormat dan perhatian (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), jujur (*fairness*), peduli (*caring*), kewarganegaraan (*citizenship*), ketulusan (*honesty*), berani (*courage*), tekun (*diligence*), dan integritas (Ahmad Tafsir, 2011:43). Selanjutnya Ari Ginanjar dengan teori ESQ menyodorkan pemikiran adanya 7 karakter dasar, yaitu: 1). Jujur, 2). Tanggung jawab, 3). Disiplin, 4). Visioner, 5). Adil, 6). Peduli, dan 7). Kerja sama.

Dari berbagai pendapat tentang pilar pendidikan karakter di atas, setiap pilar merupakan suatu entitas pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai (nilai

ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis) melalui proses intervensi dan habituasi. Intervensi adalah proses pendidikan karakter yang dilakukan secara formal, dikemas dalam interaksi belajar dan pembelajaran (*learning and instruction*) yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan menerapkan berbagai kegiatan yang terstruktur (*structured learning experiences*). Proses intervensi dapat dilakukan oleh semua subjek pelajaran namun dengan penekanan yang berbeda. Melalui interaksi belajar dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama harus melahirkan dua dampak sekaligus, yakni dampak instruksional (*instructional effect*) maupun dampak pengiring (*nurturant effect*), sedangkan interaksi belajar dan pembelajaran bidang lain cukup melahirkan dampak pengiring saja. Di samping itu, dalam interaksi belajar dan pembelajaran tersebut pendidik (guru, dosen, tutor, instruktur) sebagai pendidik yang mencerdaskan dan mendewasakan dan sekaligus harus bertindak sebagai sosok anutan (*role model*).

Habituasi adalah proses penciptaan aneka situasi dan kondisi (*persistent-life situation*) yang berisi aneka

penguatan (*reinforcement*) yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadikan perangkat nilai yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi melalui proses olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa itu sebagai karakter atau watak. Sebagai contoh, karakter jujur, terbentuk dalam satu kesatuan utuh antara tahu makna jujur (apa dan mengapa jujur), mau bersikap jujur, dan berperilaku jujur. Karena setiap nilai berada dalam spektrum atau kluster nilai-nilai, maka secara psikologis dan sosial-kultural suatu nilai harus koheren dengan nilai lain dalam klusternya untuk membentuk karakter yang utuh. Misalnya, karakter jujur terkait pada nilai jujur, tanggung jawab, dan peduli. Peserta didik yang berperilaku jujur dalam mengerjakan soal ujian, artinya ia peduli terhadap penegakkan disiplin dan peningkatan mutu pendidikan karena dengan perilakunya yang jujur tersebut dapat dibangun sportivitas, etos kerja keras, dan kemandirian. Karena itu jika kejujuran sudah tertanam pada sanubari dan 'merasuk merajasukma' (*personalized*) pada diri peserta didik tidak perlu adanya pengawas ujian

dan tidak akan ada pihak yang mencari keuntungan dari jual beli naskah soal ujian maupun upaya membocorkan soal ujian. Sebaliknya jika kejujuran telah sirna adanya pengawas ujian sehebat apapun maupun penjagaan polisi seketat apapun menyontek pada saat ujian dan upaya pembocoran soal sampai kapan pun akan tetap menghiasi saat-saat ujian berlangsung.

Ada sementara kalangan pendidik mempersepsi pendidikan karakter sebagai suatu bahan pelajaran baru yang tentu saja akan menambah materi baru dalam kurikulum satuan pendidikan. Persepsi itu tidak semuanya salah sebab kehadiran pendidikan karakter memang harus disambut dengan karya nyata para pendidik di satuan pendidikan untuk menyemai generasi muda yang berkarakter. Namun walaupun demikian kehadiran pendidikan karakter bukan dimaksudkan untuk menambah pelajaran baru melainkan menyempurnakan proses belajar dan pembelajaran yang ada agar menyentuh pengembangan karakter warganegara. Di samping itu, pengembangan karakter tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi kedalam mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan. Oleh karena

itu guru dan satuan pendidikan perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam Kurikulum (KTSP, silabus dan RPP) yang sudah ada.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Karakter itu tidak dapat dikembangkan secara cepat dan segera (*instant*), tetapi harus melewati suatu proses yang panjang, cermat, dan sistemik. Berdasarkan perspektif yang berkembang dalam sejarah pemikiran manusia, pendidikan karakter harus dilakukan berdasarkan tahap-tahap perkembangan anak sejak usia dini

sampai dewasa. Setidaknya, berdasarkan pemikiran psikolog Kohlberg (1992) dan ahli pendidikan dasar Marlene Lockheed (1990), terdapat empat tahap pendidikan karakter yang perlu dilakukan, yaitu (a) tahap pembiasaan sebagai awal perkembangan karakter anak, (b) tahap pemahaman dan penalaran terhadap nilai, sikap, perilaku dan karakter siswa; (c) tahap penerapan berbagai perilaku dan tindakan siswa dalam kenyataan sehari-hari; dan (d) tahap pemaknaan yaitu suatu tahap refleksi dari para siswa melalui penilaian terhadap seluruh sikap dan perilaku yang telah mereka pahami dan lakukan dan bagaimana dampak dan kemanfaatannya dalam kehidupan baik bagi dirinya maupun orang lain. Jika seluruh tahap ini telah dilalui, maka pengaruh pendidikan terhadap pembentukan karakter peserta didik akan berdampak secara berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan hal tersebut, maka program pendidikan karakter perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1). Berkelanjutan. Mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk

sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas satu SD atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas terakhir SMP. Pendidikan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun. 2). Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan. Mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa dilakukan melalui kegiatan kurikuler setiap mata pelajaran, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Pembinaan karakter melalui kegiatan kurikuler mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama harus sampai melahirkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*), sedangkan bagi mata pelajaran lain cukup melahirkan dampak pengiring. 3). Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan (*value is neither taught nor learned, it is learned*) (Hermann, 1972) mengandung makna bahwa materi nilai-nilai dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang

sampai dewasa. Setidaknya, berdasarkan pemikiran psikolog Kohlberg (1992) dan ahli pendidikan dasar Marlene Lockheed (1990), terdapat empat tahap pendidikan karakter yang perlu dilakukan, yaitu (a) tahap pembiasaan sebagai awal perkembangan karakter anak, (b) tahap pemahaman dan penalaran terhadap nilai, sikap, perilaku dan karakter siswa; (c) tahap penerapan berbagai perilaku dan tindakan siswa dalam kenyataan sehari-hari; dan (d) tahap pemaknaan yaitu suatu tahap refleksi dari para siswa melalui penilaian terhadap seluruh sikap dan perilaku yang telah mereka pahami dan lakukan dan bagaimana dampak dan kemanfaatannya dalam kehidupan baik bagi dirinya maupun orang lain. Jika seluruh tahap ini telah dilalui, maka pengaruh pendidikan terhadap pembentukan karakter peserta didik akan berdampak secara berkelanjutan (*sustainable*).

Berdasarkan hal tersebut, maka program pendidikan karakter perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 1). Berkelanjutan. Mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk

sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas satu SD atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas terakhir SMP. Pendidikan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun. 2). Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan. Mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa dilakukan melalui kegiatan kurikuler setiap mata pelajaran, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler. Pembinaan karakter melalui kegiatan kurikuler mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama harus sampai melahirkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*), sedangkan bagi mata pelajaran lain cukup melahirkan dampak pengiring. 3). Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan (*value is neither taught nor taught, it is learned*) (Hermann, 1972) mengandung makna bahwa materi nilai-nilai dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh diinternalisasi melalui proses belajar. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang

dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, atau pun fakta seperti dalam mata pelajaran tertentu. 4). Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip "tut wuri handayani" dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif.

Meminjam terminologi yang dipergunakan David Kerr (1999), pada saat menjelaskan isi dan modus *Citizenship Education*, maka proses pembelajaran pendidikan karakter hendaknya dilakukan secara inklusif pada pembelajaran semua mata pembelajaran di kelas, luar kelas, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan proses pembelajaran yang demikian dimaksudkan untuk menghindarkan pendidikan karakter dari sifat yang eksklusif dimana upaya pembinaan karakter hanya dilakukan oleh mata pelajaran tertentu sementara pelajaran maupun program pendidikan lain di sekolah maupun luar sekolah

termasuk di keluarga dan masyarakat tidak menyentuhnya sama sekali. Berikut ini beberapa implementasi pendidikan karakter di sekolah.

### **Kegiatan pendidikan karakter di kelas**

Di kelas dapat dilakukan dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKn) maupun pelajaran lain. Khusus bagi PKn yang secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral hendaknya melahirkan dua dampak sekaligus, yakni dampak instruksional maupun dampak pengiring. Dampak instruksional adalah pengaruh langsung dari proses belajar dan pembelajaran yang biasanya dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Misalnya setelah peserta didik mempelajari topik demokrasi mereka dapat 1). Mengidentifikasi dasar-dasar demokrasi (*foundation of democracy*) secara universal yang dapat diterima semua negara di dunia (ranah kognitif); 2). Membedakan praktik demokrasi di berbagai negara berdasarkan latar belakang sejarah, ideologi, dan tujuan nasional masing-

masing (ranah kognitif); 3). Meyakini keunggulan sistem pemerintahan demokrasi dibandingkan dengan sistem pemerintahan otoritarianisme maupun sistem pemerintahan komunisme (ranah afektif); 4). Menerapkan pola hidup demokratis dalam proses pengambilan keputusan (ranah psikomotor).

Dampak pengiring adalah pengaruh ikutan setelah peserta didik melakoni pengalaman belajar tertentu, seperti misalnya menjadi lebih peka terhadap masalah yang ada di lingkungannya, menjadi lebih toleran terhadap pandangan yang beragam, lebih kreatif, dan inovatif. Dampak pengiring akan lahir jika dan hanya jika peserta didik memiliki pengalaman belajar (*learning experience*) optimal yang mampu merangsang seluruh potensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Atas dasar pandangan demikian maka proses pembelajaran konvensional yang memosisikan peserta didik laksana botol kosong yang harus diisi ilmu pengetahuan dan pendidik bertindak sebagai satu-satunya sumber belajar, serta belajar hanya dibatasi oleh dinding kelas, tidak memberikan cukup pengalaman belajar. Pada konteks perlunya melahirkan dampak pengiring itulah kita mendambakan lahirnya model

pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di kelas dan di luar kelas. Berikut ini beberapa contoh implementasi pendidikan karakter di kelas.

**Pertama.** *Healthier food in school* (Tim USA). Para siswa sekolah menengah dari kota Vancouver, USA ini menyadari adanya masalah berkenaan dengan makanan yang tidak sehat yang mereka konsumsi sehari-hari, termasuk yang terdapat di kantin sekolah. Mereka berasumsi bahwa makanan yang tidak sehat seperti itulah yang mengakibatkan semakin banyaknya orang Amerika yang kegemukan. Bukan hanya itu mereka pun mengkhawatirkan bahwa karena kebanyakan mengkonsumsi makanan yang mereka namakan Junk Food tersebut berbagai penyakit mematikan pun kerap kali muncul, seperti penyakit jantung koroner dan kanker. Selanjutnya mereka membentuk tim peneliti untuk melakukan survei guna memperoleh jawaban untuk memecahkan masalah tersebut. Mula-mula tim peneliti melakukan wawancara dengan ahli gizi sekolah untuk memperoleh jawaban bagaimana menyiapkan makanan sehat di sekolah, bukan Junk Food. Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, tim peneliti pun

melakukan wawancara dengan sejumlah anggota masyarakat dari berbagai kalangan. Hasilnya sungguh menggembirakan, hampir sebagian besar anggota masyarakat menyetujui gagasan untuk melarang kantin sekolah menyajikan Junk Food. Selanjutnya diadakan kunjungan terhadap pejabat dinas pendidikan setempat untuk memberikan dorongan agar mengeluarkan kebijakan publik yang mengikat sekolah agar menyajikan makanan sehat. Proyek belajar ini sangat menarik karena memberikan pengalaman belajar langsung kepada para siswa. Dampak pengiring dari proses pembelajaran ini adalah melatih kepekaan siswa terhadap persoalan-persoalan yang terdapat di lingkungannya dan melatih keterampilan berpartisipasi.

**Kedua.** *Restore historic monuments* (Tim India). Para siswa dari India menyajikan proyek belajarnya dengan topik memperbaiki monumen bersejarah. Di kota tempat mereka tinggal, New Delhi terdapat sejumlah monumen bersejarah yang terlantar, tidak terawat dan sepertinya tidak ada pihak yang bertanggung jawab memeliharanya. Mereka kemudian mengunjungi sejumlah pejabat setempat yang diperkirakan memiliki

kaitan dengan keberadaan monumen tersebut untuk meminta perhatiannya agar melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Namun jawaban tidak memuaskan tim peneliti, semuanya serba klise dan saling lempar tanggung jawab. Para pejabat daerah mengatakan bahwa tugas merawat dan memperbaiki monumen bersejarah berada di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya tim melakukan wawancara dengan anggota masyarakat untuk memperoleh tanggapan tentang perlunya mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Umumnya mereka sependapat bahwa pemerintah mestibertanggungjawab terhadap keberadaan monumen bersejarah tidak boleh menelantarkannya. Para siswa justru memeberikan pemahaman lain bahwa dalam menghadapi persoalan seperti itu anggota masyarakat tidak boleh tinggal diam, harus bahu-membahu bersama pemerintah untuk memperbaiki monumen bersejarah yang terlantar itu. Selanjutnya tim melakukan kegiatan pembinaan pada anak-anak sekolah dasar untuk mencintai monumen bersejarah di daerahnya melalui lomba menggambar dengan objek monumen bersejarah. Melalui kegiatan ini para siswa belajar bagaimana menjadi bagian



dari solusi bukan bagian dari persoalan. Sosok generasi muda yang demikianlah yang dapat menatap masa depan lebih optimis.

**Ketiga.** *Acces to clean water* (Tim Senegal). Tim siswa dari sebuah desa kecil Ross Bethio, Senegal ini mengajukan masalah kesulitan memperoleh air bersih. Mereka menyaksikan keadaan dimana masyarakat mengambil air untuk keperluan hidup sehari-hari dari sebuah kubangan air yang jaraknya sekitar 26 kilometer dari desa mereka. Di samping jaraknya yang jauh, sumber air itupun tidak sehat karena terkontaminasi oleh sampah dan kotoran hewan. Akibatnya banyak anggota masyarakat yang terjangkit berbagai penyakit, seperti kolera, kudis, dan penyakit kulit lainnya. Para siswa menyadari bahwa persoalan tersebut perlu dipecahkan dan selanjutnya mereka melakukan survei untuk mencari solusi terbaik. Pertama-tama tim peneliti berkunjung pada tokoh agama setempat untuk memperoleh dukungan. Selanjutnya mereka berkunjung kepada otoritas setempat untuk menanyakan apa yang telah dan akan dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Para siswa memperoleh informasi bahwa pemerintah telah mulai membangun tower

air untuk menyuplai air ke Ross Bethio, namun proyek tersebut terbengkalai dan tak kunjung selesai walaupun sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya dengan alasan tidak cukup dana. Untuk memberi tekanan kepada pemerintah setempat agar serius menyelesaikan pembangunan tower air, tim mengorganisasikan sebuah demonstrasi damai yang diikuti seluruh siswa pada sekolah mereka menuju kantor otoritas Ress Bethio. Dengan kegigihan yang luar biasa dalam meyakinkan pemerintah bahwa solusi terbaik untuk memperoleh akses air bersih adalah penyelesaian pembangunan tower air, akhirnya otoritas setempat memulai lagi mengerjakan proyek tersebut. Dari kegiatan ini para siswa memperoleh pengalaman belajar bahwa dengan kegigihan dan kerja keraslah sesuatu dapat diraih.

**Keempat.** *School violence* (Tim Jordan). Para siswa sekolah menengah di kota Al Karak, Jordan mengangkat topik untuk proyek belajar mereka adalah kekerasan di sekolah. Para siswa mengamati bahwa di daerahnya sering kali terjadi peristiwa tersebut, utamanya di sekolah dasar baik yang dilakukan oleh guru maupun oleh temannya di sekolah. Pertama-tama mereka melakukan survei ke sekolah-

sekolah untuk memperoleh keterangan sekitar ada atau tidak adanya kekerasan di sekolah melalui serangkaian wawancara mendalam dengan para siswa. Selanjutnya tim menyebarkan angket kepada orang tua siswa untuk menjangkau data mengenai kasus kekerasan di sekolah yang menimpa anak-anak mereka. Hasilnya sangat mengejutkan bahwa banyak dari orang tua kerap kali mendapatkan anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar memperoleh perlakuan yang tidak semestinya dari gurunya terutama pada saat mereka diberi hukuman. Tim peneliti pun melakukan wawancara kepada anggota masyarakat untuk menggali pandangan masyarakat mengenai solusi apa yang dapat dipilih untuk memanggulangi kekerasan di sekolah tersebut. Dari kegiatan ini para siswa memperoleh keyakinan bahwa dalam memberikan hukuman perlu dipilih yang sifatnya mendidik (edukatif), tidak menggunakan hukuman fisik maupun nonfisik yang dapat menyakiti badan maupun jiwa anak. Di samping itu mereka pun belajar bagaimana memberi rasa empati kepada penderitaan orang lain. Siswa yang memperoleh hukuman fisik maupun nonfisik yang tidak mendidik akan mengalami luka hati maupun

luka badan yang serius. Oleh karena itu, dengan berempati mereka akan lebih memiliki kepekaan untuk memperlakukan orang lain lebih baik dan lebih manusiawi.

### **Kegiatan pendidikan karakter di luar kelas**

Pembinaan karakter siswa jangan hanya dilakukan di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung, melainkan harus dilanjutkan di luar kelas melalui kegiatan pembiasaan hidup berkarakter. Program inklusi yang dilakukan semua mata pelajaran di kelas tampaknya perlu dilanjutkan hingga di luar kelas dengan cara melakukan pembagian tanggung jawab pembinaan perilaku untuk setiap mata pelajaran. Berikut ini menurut (Dasim Budimansyah, 2010) beberapa contoh berikut dapat dijadikan sekedar model pembagian tanggung jawab dimaksud: 1). Guru PKn berkonsentrasi untuk membina siswa agar berperilaku tertib pada saat mengikuti upacara bendera. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman makna upacara bendera, mengawasi pada saat pelaksanaannya, hingga berpartisipasi dalam melatih petugas upacara bendera. 2). Guru pendidikan agama

berkonsentrasi untuk membina siswa agar taat melaksanakan ibadah di sekolah. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah menjadi teladan dalam menjalankan ibadah di sekolah, menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan ibadah di sekolah, dan sebagainya. 3). Guru biologi berkonsentrasi untuk membina siswa agar memiliki kesadaran lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan; tidak mencoret-coret bangku, dinding sekolah, dan dinding WC; tidak mengganggu tanaman, bunga, dan pohon. Tindakan nyata yang dapat dilakukan adalah memelopori pembuatan taman sekolah dimana setiap kelas memiliki taman binaannya masing-masing; mengawasi kebersihan kelas dan lingkungan; dan sebagainya. 4). Guru fisika berkonsentrasi terhadap upaya pengembangan daya kreatifitas siswa. Tindakan nyata yang harus dilakukan adalah mengubah gaya mengajarnya yang deduktif pada gaya mengajar yang induktif. Kreatifitas akan muncul mengikuti gaya induktif dimana para siswa dibiasakan memecahkan suatu persoalan dari data yang disajikan bukan sebaliknya pembelajaran diawali dari menghafal hukum atau dalil. 5). Guru sosiologi berkonsentrasi untuk membina siswa agar

pandai bergaul dan beradaptasi di sekolah. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah mengawasi pergaulan siswa di sekolah, utamanya kelompok-kelompok teman sebaya jangan sampai muncul geng-geng yang destruktif seperti geng motor. 6). Guru ekonomi berkonsentrasi terhadap upaya pembinaan siswa agar menjadi insan yang jujur dan memiliki jiwa kewirausahaan. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah menggagas berdirinya Kantin Kejujuran dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memupuk jiwa kewirausahaan. 7). Guru pendidikan jasmani dan olah raga kesehatan berkonsentrasi untuk membina siswa agar memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungannya. Tindakan nyata yang perlu dilakukan seperti menggagas perlombaan usaha kesehatan sekolah, kompetisi olah raga kesehatan, dan sebagainya. 8). Guru matematika berkonsentrasi untuk membina siswa agar memiliki konsistensi penalaran logis-matematis, berbahasa yang tidak ambigu istilah, ungkapan, definisi, pernyataan. Tindakan nyata yang perlu dilakukan adalah membuat terobosan-terobosan program tentang kebergunaan matematika di luar matematika – dapat dipakai untuk kebutuhan ilmu

dan pengetahuan lain. 9). Guru bahasa Indonesia berkonsentrasi terhadap upaya membina siswa agar mahir berbahasa Indonesia baku, berbahasa santun, dan sebagainya. Tindakan nyata yang dapat dilakukan seperti menyekenggarakan bulan bahasa yang diisi dengan berbagai perlombaan berbahasa yang baik.

## Kesimpulan

Pendidikan karakter sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan sistem pendidikan nasional dikembangkan dan dilaksanakan secara sistemik dan holistik dalam tiga pilar nasional pendidikan karakter, yaitu: satuan pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, satuan/program pendidikan nonformal), keluarga (keluarga inti, keluarga luas, keluarga orang tua tunggal), dan masyarakat (komunitas, masyarakat lokal, wilayah, bangsa, dan negara). Implementasi proses pembelajaran pendidikan karakter hendaknya dilakukan secara inklusif pada pembelajaran semua mata pembelajaran di kelas, luar kelas, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan proses pembelajaran yang demikian dimaksudkan untuk menghindarkan pendidikan karakter dari sifat yang eksklusif

dimana upaya pembinaan karakter hanya dilakukan oleh mata pelajaran tertentu sementara pelajaran maupun program pendidikan lain di sekolah maupun luar sekolah termasuk di keluarga dan masyarakat tidak menyentuhnya sama sekali.

Upaya pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa ini tentu tidak semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan belajar mengajar dan luar sekolah, tetapi juga melalui pembiasaan (habitiasi) dalam kehidupan, seperti: religius, jujur, disiplin, toleransi, kerja keras, cinta damai, tanggung jawab dan sebagainya. Pembiasaan itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang hal yang benar dan salah, tetapi juga mampu merasakan terhadap nilai yang baik dan tidak baik serta bersedia melakukannya dengan lingkup terkecil seperti keluarga sampai dengan cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai tersebut perlu ditumbuhkembangkan peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi cerminan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran yang besar dalam pengembangan pendidikan karakter karena peran sekolah sebagai pusat kebudayaan melalui pendidikan pengembangan budaya sekolah (*school culture*).

Tingkat keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur melalui suatu proses dari implementasi kebijakan tersebut, sehingga implementasi merupakan suatu proses yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau yang telah dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu atau dengan kata lain suatu kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian implementasi kebijakan bukanlah merupakan permasalahan yang sederhana, karena bagaimanapun pada tataran pelaksanaan sebuah kebijakan di dalamnya terkait banyak berbagai dimensi, mulai dari interpretasi, organisasi, dukungan sumber daya dan sumber dana, serta mentalitas budaya dari masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada permasalahan pelaksanaan kebijakan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi serta keikutsertaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah guna mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan daerah

di segala bidang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Ibrahim, 2004. *Pokok – pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Mandar Maju, Bandung.
- Budimansyah, D. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Widya Aksara Press, Bandung.
- Center for Indonesian Civic Education. 1999. *Democratic Citizen in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*, CICED, Bandung.
- Hasanah, Aan. 2009. *Pendidikan Berbasis Karakter*. <http://www.mediaindonesia.com/ak/2009/12/14/111318/68/11/Pendidikan-Berbasis-Karakter.html>. Diakses pada 10 Juni 2010.
- Hesel, Nogi S Tangkulan, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi ( Konsep, Strategi dan Kasus )*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Jamal Ma'mur. 2011. *Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekola*, Diva Press, Yogyakarta.
- Kemendiknas. 2011. *Panduan Pelaksanaan pendidikan*

- Karakter*, Balitbang Puskurbuk, Jakarta.
- Kesuma, Dharma. Triatna, Chepi & Permana, Johar. 2011. *Pendidikan Karakter: kajian teori dan Praktik Di Sekolah*, PT remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kusuma, Dony. 2004. *Pendidikan Karakter*, Grasindo, Jakarta.
- Lickona, T. 1992. *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, Simon & Schuster, Inc, New York.
- \_\_\_\_\_, T. 2004. *Character Matters: How to Help Our Children Develop*, Simon & Schuster, Inc, New York.
- Mochammad Sohib, 2008. *Nasionalisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Dispenad, Jakarta.
- M. Irfan Islami, 2000. *Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muchlas Samani & Hariyanto, 2011. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Muslich, Masnur. 2011. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Tafsir, Ahmad. 2011. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga Pendidikan*, Kencana, Jakarta.

